

LAPORAN MONEV RENCANA AKSI TRIWULAN I																						
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH																						
KABUPATEN PESISIR SELATAN																						
TAHUN ANGGARAN 2026																						
No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Per TWL	TARGET INDIKATOR KINERJA	REALI SASI	% Capaian	Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama					Hambatan/ Permasalahan Pencapaian Target	Tindakan/lanjutan yang telah / harus dilakukan	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	Target	Per Tw	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran	KETERANGAN
							Langkah-langkah/aktivitas pencapaian target IKU	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL																			281.615.601.585	27.009.143.501	
1	MENINGKATNYA KUALITAS AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	1. Nilai AKIP Perangkat Daerah	TW 1	25%	25%	100%	1. Melakukan monitoring berkala terhadap dokumen perencanaan (Renstra & Renja) agar selaras dengan target kinerja	25%				Kualitas data pendukung kinerja dari unit kerja belum seragam dan sering terlambat.	Melakukan asistensi intensif (desk) penyusunan laporan kinerja per triwulan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100%	TW 1	25%	56.680.000	20.025.875	Sekretariat
			TW 2	50%		2. Mengintegrasikan sistem pelaporan kinerja secara digital (e-Sakip).	25%			Pemahaman SDM mengenai budaya kinerja (bukan sekadar administrasi) masih perlu ditingkatkan	Pemberian reward dan punishment berdasarkan hasil evaluasi AKIP internal.						TW 2					
			TW 3	75%		3. Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan Laporan Kinerja (LKJIP) bagi setiap unit kerja.	25%											TW 3				
			TW 4	100%														TW 4				
															Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan dengan baik	100%	TW 1	25%	24.244.910.108,00	1.721.025.959	
		2. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	TW 1	15%	15%	100%	1. Melakukan inventarisasi dan pendataan inisiatif inovasi di setiap unit kerja.	25%				Kurangnya pemahaman SDM mengenai parameter teknis penilaian kematangan inovasi	Menyelenggarakan Workshop atau Bimbingan Teknis khusus pengisian indeks inovasi daerah.					TW 2				
			TW 2	65%			2. Melengkapi dokumen pendukung (evidence) seperti regulasi, SOP, dan profil inovasi secara digital.	25%				Dokumentasi bukti fisik (evidence) seringkali tidak lengkap atau tidak sesuai dengan standar aplikasi.	Melakukan pendampingan intensif (desk) untuk verifikasi dokumen bukti fisik sebelum diunggah.					TW 3				
			TW 3	100%			3. Melaksanakan uji coba inovasi minimal 6 bulan untuk memastikan stabilitas dan kemanfaatan sistem.	25%				Keterbatasan anggaran untuk pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur inovasi berbasis IT.	Mengintegrasikan anggaran pemeliharaan inovasi ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan.					TW 4				
			TW 4				4. Melakukan input data dan koordinasi aktif dengan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) atau Bappeda.	25%				Mutasi atau pergantian pengelola inovasi yang menyebabkan terputusnya keberlanjutan program.	Membuat regulasi tingkat Kepala PD (SK/Instruksi) sebagai payung hukum agar inovasi tetap berjalan.		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang berkualitas	100%	TW 1	25%	14.704.250,00	4.797.200	
																		TW 2				
																		TW 3				
																		TW 4				
															Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	100%	TW 1	25%	356.567.490,00	93.730.155	
																		TW 2				
																		TW 3				
																		TW 4				
															Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	TW 1	25%	182.442.000	17.982.000	
																		TW 2				

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Per TWL	TARGET INDIKATOR KINERJA	REALI SASI	% Capaian	Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama					Hambatan/ Permasalahan Pencapaian Target	Tindakanlanjut yang telah / harus dilakukan	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	Target	Per Tw	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran	KETERANGAN		
							Langkah-langkah/aktivitas pencapaian target IKU	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4													
1	2	3		4			5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
																		TW 3						
																		TW 4						
															Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	TW 1	25%	1.157.112.000	255.786.818			
																		TW 2						
																		TW 3						
																		TW 4						
															Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan dengan baik	100%	TW 1	25%	841.674.300,00	129.761.081,00			
																		TW 2						
																		TW 3						
																		TW 4						
2	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	TW 1	15%	15%	15%	1	Penguatan Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	25%					1. Konsistensi Program: Lemahnya integrasi antara rencana strategis dengan alokasi anggaran, sehingga program kurang solutif dan	Melakukan Pembinaan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	TW 1	25%	1.468.769.317,00	358.453.800,00	Bidang Anggaran
			TW 2	65%	65%	65%		Memastikan sinkronisasi nomenklatur program dan kegiatan antara RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, dan APBD.	25%				2. Keterbatasan aparaturn yang memahami teknis pengelolaan keuangan modern dan dimensi IPKD.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan				TW 2						
			TW 3	100%	100%	100%		Kesesuaian APBD dengan KUA-PPAS secara teknis.	25%				3. Ketidaktepatan atau keterlambatan dalam menginput data ke dalam sistem IPKD (aplikasi BSKDN).					TW 3						
																		TW 4						
															Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	TW 1	25%	357.446.191	76.770.288,00	Bidang Perbendahraan		
																		TW 2						
							3	Peningkatan Transparansi Pengelolaan Keuangan (Dimensi 3)	25%										TW 3					
																			TW 4					
							4	Akselerasi Penyerapan Anggaran (Dimensi 4)	25%							Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	TW 1	25%	326.675.300	70.490.390,00	Bidang Akuntansi	

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Per TWL	TARGET INDIKATOR KINERJA	REALI SASI	% Capaian	Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama					Hambatan/ Permasalahan Pencapaian Target	Tindakanlanjut yang telah / harus dilakukan	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	Target	Per Tw	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran	KETERANGAN			
							Langkah-langkah/aktivitas pencapaian target IKU	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4														
1	2	3	4			5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
								Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun anggaran.	25%								TW 2								
								Meminimalisir penumpukan pencairan dana di akhir tahun.	25%								TW 3								
						5		Perbaikan Kondisi Keuangan Daerah (Dimensi 5)	25%								TW 4								
								Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengelola kewajiban/utang daerah dengan baik.	25%					Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	12 Laporan	TW 1	3 Laporan	249.531.226.286	23.812.812.074	Bidang Perbendahraan				
						6		Peningkatan Opini BPK (Dimensi 6)	25%								TW 2					Bidang BMD			
								Mempercepat tindak lanjut rekomendasi BPK atas laporan keuangan tahun sebelumnya untuk mempertahankan/mencapai opini WTP.	25%								TW 3								
						7		Teknis Pelaksanaan	25%								TW 4								
								Melakukan input data pada Aplikasi Pengukuran IPKD sesuai jadwal yang ditetapkan Kemendagri	25%						Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	17240 Dokumen	TW 1	4300 Dokumen	72.079.600	31.017.122,00				
								Memperbaiki bukti kepemilikan aset daerah.	25%									TW 2							
																		TW 3							
																		TW 4							
															Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan BMD dengan baik	100%	TW 1	25%	909.787.795	113.786.370,00	Bidang BMD			
																		TW 2							
																	TW 3								
																	TW 4								
3	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3 Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	TW 1	15%	15%	15%	1.	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pajak/retribusi daerah.	25%	25%	25%	25%	Masih tingginya ketergantungan pada dana transfer pusat (DAU/DAK).	Melakukan pemutakhiran data subjek dan objek pajak daerah.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	TW 1	25%	2.095.526.948,00	302.704.369,00	Bidang Pendapatan		
			TW 2	25%	25%	25%	2.	Penyederhanaan birokrasi perizinan untuk menarik investasi masuk ke daerah.	25%	25%	25%	25%	Belum maksimalnya pemanfaatan potensi ekonomi lokal pasca-pandemi atau perubahan regulasi pusat.	Kerja sama dengan sektor swasta (BUMD) dalam pengelolaan potensi ekonomi daerah yang strategis.					TW 2						
			TW 3	65%	65%	65%	3.	Optimalisasi pengelolaan aset daerah (pemanfaatan lahan/bangunan) untuk menambah pemasukan.	25%	25%	25%	25%							TW 3						
			TW 4	100%	100%	100%													TW 4						
																				281.615.601.585	27.009.143.501				

Panjen, 31 Maret 2026
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

SUHANDRI SE, M.M
Nip. 19700608 200212 1 003